Pelatihan Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Jambi

Usna Aning Yulianti., S.Si.

Kementerian Dalam Negeri

DASAR HUKUM

Pasal 373 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kementerian Dalam Negeri merupakan koordinator pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pembinaan umum:

pembagian urusan pemerintahan	kelembagaan daerah	kepegawaian pada Perangkat Daerah	keuangan daerah	Pembangunan daerah	pelayanan publik di daerah	kerja sama daerah	kebijakan daerah;	kepala daerah dan DPRD	Lainnya
-------------------------------	--------------------	-----------------------------------	-----------------	--------------------	----------------------------	-------------------	-------------------	------------------------	---------

Peningkatan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang keuangan daerah.

IPKD

Permendagri No.19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

TUJUAN PENGUKURAN IPKD

Pasal 2 Permendagri No. 19 Tahun 2020

Memperoleh gambaran (peta) pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah Provinsi dan Kab/Kota

1 mengukur kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam periode tertentu;

2 memacu dan memotivasi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah;

3 melakukan publikasi atas hasil pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah bagi pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota;

4 memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah yang memiliki indeks pengelolaan keuangan daerah yang terbaik;

5 meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam mewujudkan pengawasan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

DIMENSI DAN INDIKATOR INDEKS PKD

1. KESESUAIAN DOKUMEN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

- 1) Kesesuaian program RPJMD & RKPD
- 2) Kesesuaian program RKPD & KUA-PPAS
- 3) Kesesuaian Program KUA-PPAS & APBD
- 4) Kesesuaian Pagu RKPD & KUA-PPAS
- 5) Kesesuaian Pagu KUA-PPAS & APBD

3. TRANSPARANSI KEUANGAN DAERAH

- 1) Ketepatan waktu pengungkapan
- 2) Keteraksesan

5. KONDISI KEUANGAN DAERAH

1. Kemandirian keuangan
2. Solvabilitas jangka panjang
3. Fleksibilitas keuangan
4. Solvabilitas layanan
5. Solvabilitas Operasional
6. Solvabilitas jangka pendek

2. PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA DALAM APBD

1. Alokasi jumlah belanja untuk fungsi pendidikan min 20% dari APBD
2. Alokasi jumlah belanja untuk urusan kesehatan min 10% dari APBD
3. Alokasi jumlah belanja untuk infrastruktur yang langsung dalam alokasi Dana Transfer min 25% dari DTU
4. Alokasi jumlah belanja untuk memenuhi SPM sesuai perundang-undangan

4. PENYERAPAN ANGGARAN

- 1) Belanja Transfer daerah
- 2) Belanja Operasional
- 3) Belanja Modal
- 4) Belanja tak terduga

6. OPINI BPK ATAS LKPD

Pengukuran dilakukan terhadap hasil opini BPK terhadap LKPD selama 3 tahun berturut-turut.

**PENGUKURAN
INDEKS
PENGELOLAAN
KEUANGAN
DAERAH**

APLIKASI PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

alamat web: <http://ipkd-bpp.kemendagri.go.id/>

Instansi	Username	Password
Provinsi Jambi	jambi_15	123456
Kabupaten Batanghari	batanghari_1504	123456
Kabupaten Bungo	bungo_1508	123456
Kabupaten Kerinci	kerinci_1501	123456
Kabupaten Merangin	merangin_1502	123456
Kabupaten Muaro Jambi	muarojambi_1505	123456
Kabupaten Sarolangun	sarolangun_1503	123456
Kabupaten Tanjung Jabung Barat	tanjungjabungbarat_1506	123456
Kabupaten Tanjung Jabung Timur	tanjungjabungtimur_1507	123456
Kabupaten Tebo	tebo_1509	123456
Kota Jambi	tebo_1509	123456
Kota Sungai Penuh	kotasungaipenuh_1572	123456

Daftar Username dan Password Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota se-Jambi

EVALUASI PENGINPUTAN DATA IPKD PROVINSI JAMBI TAHUN 2018

No.	PROVINSI	Keterangan					
		Dim. 1	Dim. 2	Dim. 3	Dim. 4	Dim. 5	Dim. 6
1	Provinsi Jambi	-	-	*	√	√	*
2	Kabupaten Batanghari	√	√	*	√	√	√
3	Kabupaten Bungo	√	-	*	√	√	*
4	Kabupaten Kerinci	*	-	-	-	-	-
5	Kabupaten Merangin	-	√	*	√	√	*
6	Kabupaten Muaro Jambi	*	-	-	-	-	*
7	Kabupaten Sarolangun	*	√	*	√	√	√
8	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	-	-	-	√	√	*
9	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	√	√	√	√	√	*
10	Kabupaten Tebo	√	√	-	√	√	*
11	Kota Jambi	√	√	*	√	√	*
12	Kota Sungai Penuh	-	√	*	√	√	*

INPUT DATA
SESUAI

INPUT DATA
TIDAK
LENGKAP/TIDAK
SESUAI

TIDAK INPUT
DATA

EVALUASI PENGINPUTAN DATA IPKD PROVINSI JAMBI TAHUN 2019

No.	PROVINSI	Keterangan					
		Dim. 1	Dim. 2	Dim. 3	Dim. 4	Dim. 5	Dim. 6
1	Provinsi Jambi	-	-	*	V	V	*
2	Kabupaten Batanghari	V	V	*	V	V	V
3	Kabupaten Bungo	*	-	*	V	V	*
4	Kabupaten Kerinci	*	-	-	-	-	-
5	Kabupaten Merangin	-	V	*	V	V	*
6	Kabupaten Muaro Jambi	*	-	-	-	-	*
7	Kabupaten Sarolangun	*	V	*	V	V	V
8	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	-	-	-	V	V	*
9	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	V	V	V	V	V	*
10	Kabupaten Tebo	V	V	-	V	V	*
11	Kota Jambi	V	V	*	V	V	*
12	Kota Sungai Penuh	-	V	*	V	-	*

INPUT DATA
SESUAI

INPUT DATA
TIDAK
LENGKAP/TIDAK
SESUAI

TIDAK INPUT
DATA

EVALUASI PENGINPUTAN DATA IPKD PROVINSI JAMBI TAHUN 2020

No.	PROVINSI	Keterangan					
		Dim. 1	Dim. 2	Dim. 3	Dim. 4	Dim. 5	Dim. 6
1	Provinsi Jambi	-	-	*	√	√	√
2	Kabupaten Batanghari	√	√	*	√	√	√
3	Kabupaten Bungo	*	-	*	√	√	*
4	Kabupaten Kerinci	*	-	-	-	-	-
5	Kabupaten Merangin	-	√	*	√	√	√
6	Kabupaten Muaro Jambi	*	-	-	-	-	√
7	Kabupaten Sarolangun	*	√	*	√	√	√
8	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	-	-	-	√	√	√
9	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	√	√	√	√	√	√
10	Kabupaten Tebo	√	√	-	√	√	√
11	Kota Jambi	√	√	*	√	√	√
12	Kota Sungai Penuh	-	√	*	√	√	√

INPUT DATA
SESUAI

INPUT DATA
TIDAK
LENGKAP/TIDAK
SESUAI

TIDAK INPUT
DATA

APLIKASI PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

alamat web: <http://ipkd-bpp.kemendagri.go.id/>

IPKD Cari menu disini... Indonesia

MAIN

- Dashboard

IPKD KABUPATEN BOGOR

- Laporan **1**
- Hasil Pengukuran **2**

PENGATURAN

- Data Instansi
- Ubah Password

BANTUAN

- FAQ
- Hubungi Kami
- Dokumen IPKD

LOGOUT

- Keluar Sistem **3**

Tingkatkan Kinerja Tata Kelola Keuangan Daerah dan Jadilah Instansi Terbaik !..
Siapakah instansi terbaik selanjutnya pada tahun 2021 ?

TAMPILAN
DASHBOARD
APLIKASI

- 1 Menu Laporan**
Pada menu laporan berisi sub menu penginputan data 6 Dimensi
- 2 Menu Hasil Pengukuran IPKD**
Pada menu ini berisikan data hasil pengukuran IPKD yang telah di lakukan oleh Provinsi
- 3 Menu Logout**
Menu ini berfungsi jika Pemda ingin keluar dari Aplikasi IPKD.

Dimensi-1 Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penggangan

Buat Data RPJMD Baru

Nama Kepala Pemerintah Daerah

Nama Wakil Kepala Pemerintah Daerah

Periode Awal RPJMD Periode Akhir RPJMD

Pilih periode awal laporan yang ingin dibuat Pilih periode akhir laporan yang ingin dibuat

Buat Laporan RPJMD

IPKD Cari menu disini... Indonesia

MAIN

- Dashboard

IPKD PROVINSI

- Laporan**
- Dimensi 1
- Dimensi 2
- Dimensi 3
- Dimensi 4
- Dimensi 6

HASIL PENGUKURAN

- IPKD KABUPATEN / KOTA
- Laporan
- Pengukuran
- Hasil Pengukuran

PENGATURAN

- Data Instansi
- Ubah Password

BANTUAN

- FAQ

RPJMD
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

RPJMD Periode 2021-2026

RPJMD adalah penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

RPJMD Periode 2016-2021

RPJMD adalah penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

8 Data 20 Data 40 Data 60 Data

Dimensi-1 Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penggangan

Buat Data RKPD Baru

Periode RPJMD

Tahun Anggaran RKPD

RPJMD periode 2016-2021

RKPD Tahun 2017

Buat Laporan RKPD

IPKD Cari menu disini... Indonesia

MAIN

- Dashboard

IPKD KABUPATEN / KOTA

- Laporan
 - Dimensi 1
 - Dimensi 2
 - Dimensi 3
 - Dimensi 4
 - Dimensi 5

Hasil Pengukuran

PENGATURAN

- Data Instansi
- Ubah Password

BANTUAN

- FAQ
- Hubungi Kami
- Dokumen IPKD

LOGOUT

- Keluar Sistem

Buat data RKPD baru disini

RKPD

Rencana Kerja Pemerintahan Daerah

RKPD Tahun 2021

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah.

Detail RKPD File Pernyataan Hapus Data

RKPD Tahun 2020

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah.

Detail RKPD File Pernyataan Hapus Data

RKPD Tahun 2019

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah.

Detail RKPD File Pernyataan Hapus Data

RKPD Tahun 2018

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah.

Detail RKPD File Pernyataan Hapus Data

Dimensi-1 Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penggangan

Buat Data KUA-PPAS Baru

Tahun Anggaran KUA-PPAS dan RKPD

KUA-PPAS dan RKPD Tahun 2021

Buat Laporan KUA-PPAS

IPKD Cari menu disini... Indonesia

MAIN
Dashboard

IPKD KABUPATEN / KOTA
Laporan
• Dimensi 1
○ Dimensi 2
○ Dimensi 3
○ Dimensi 4
○ Dimensi 5
○ Dimensi 6

Hasil Pengukuran
Data Instansi
Ubah Password

BANTUAN
FAQ
Hubungi Kami
Dokumen IPKD

LOGOUT
Keluar Sistem

KUA - PPAS
Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara

Buat data KUA-PPAS baru disini

KUA-PPAS Tahun 2020
KUA-PPAS memuat program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya.
Detail KUAPPAS File Pernyataan Hapus Data

KUA-PPAS Tahun 2019
KUA-PPAS memuat program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya.
Detail KUAPPAS File Pernyataan Hapus Data

KUA-PPAS Tahun 2018
KUA-PPAS memuat program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya.
Detail KUAPPAS File Pernyataan Hapus Data

Dimensi-1 Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penggangan

Buat Data APBD Baru

Tahun Anggaran APBD dan KUA-PPAS

KUA-PPAS dan APBD Tahun 2021

Buat Laporan APBD

Dimensi-1 Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penggangan

Cara Mengupload Dokumen

Contoh : Dokumen RKPD (Langkah yang sama untuk dok.KUAPPAS dan APBD)

The screenshot shows the IPKD web application interface. The left sidebar contains navigation options: MAIN (Dashboard), IPKD KABUPATEN / KOTA (Laporan, Dimensi 1-6), Hasil Pengukuran, PENGATURAN (Data Instansi, Ubah Password), and BANTUAN. The main content area is titled 'Dimensi 1 | Laporan Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran | RKPD'. It features three steps for document upload, each with a large orange checkmark icon:

- Langkah 1:** Download template Excel dan isi 6 kolom yang tersedia dengan informasi pada instansi anda. Pastikan mengisi semua kolom dan tidak ada baris yang terlangkah. [Download Template](#)
- Langkah 2:** Upload template excel yang sudah berisi data instansi anda dan pastikan tidak ada baris yang kosong atau terlangkah. Algoritma akan dihentikan jika terdapat hal seperti itu. [Upload File Excel](#)
- Langkah 3:** Upload file pernyataan instansi anda dalam bentuk PDF. File pernyataan hanya dapat di upload sekali dan untuk menghapusnya maka harus menghapus laporan ini. [Upload File Pernyataan](#)

Below the steps is a 'Detail Laporan' section for 'Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah. Berikut adalah detail laporan instansi anda:'. It shows 'Tahun RKPD 2021' and 'Periode RPJMD 2016-2021'. A 'Kembali' link is visible in the top right corner.

RKPD Tahun 2021

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah.

[Detail RKPD](#)

[File Pernyataan](#)

[Hapus Data](#)

Dimensi-1 Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

Cara Mengupload Dokumen

Contoh : Dokumen RKPD yang berhasil diupload maka akan muncul table sebagai berikut

IPKD Cari menu disini... Indonesia

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah. Berikut adalah detail laporan instansi anda:

Tahun RKPD: 2021 Periode RPJMD: 2016-2021

Buttons: Cari Detail Laporan, Download Laporan, Hapus Laporan

Kode Urusan	Urusan	Kode Program	Program	Perangkat Daerah	Pagu
1.2	KESEHATAN	1212123	Program Manajemen Kes ...	Dinas Kesehatan	Rp. 6.080.708.122 ...
1.2	KESEHATAN	1212122	Program Kesehatan Mas ...	Dinas Kesehatan	Rp. 8.763.046.130 ...
1.2	KESEHATAN	1212121	Program Kesehatan Aki ...	Dinas Kesehatan	Rp. 1.800.521.160 ...
1.2	KESEHATAN	1212120	Program Peningkatan S ...	Dinas Kesehatan	Rp. 18.176.000.000 ...
1.2	KESEHATAN	1212119	Program Peningkatan S ...	Dinas Kesehatan	Rp. 36.174.953.493 ...
1.2	KESEHATAN	1212112	Program Sumber Daya K ...	Dinas Kesehatan	Rp. 83.651.522.203 ...
1.1	PENDIDIKAN	1111154	Program Dukungan Mana ...	Dinas Pendidikan	Rp. 32.301.389.600 ...
1.1	PENDIDIKAN	1111153	Program Dukungan Mana ...	Dinas Pendidikan	Rp. 29.928.722.900 ...
1.1	PENDIDIKAN	1111152	Program Dukungan Mana ...	Dinas Pendidikan	Rp. 40.331.030.000 ...
1.1	PENDIDIKAN	1111151	Program Dukungan mana ...	Dinas Pendidikan	Rp. 48.719.292.349 ...
1.1	PENDIDIKAN	1111150	Program Dukungan Mana ...	Dinas Pendidikan	Rp. 48.933.066.000 ...
1.1	PENDIDIKAN	1111149	Program Dukungan Mana ...	Dinas Pendidikan	Rp. 38.868.714.315 ...

Untuk mencari
detil laporan

Untuk
mendownload
laporan

Untuk
menghapus
laporan

Dimensi-2 Alokasi Belanja dalam APBD

Sun May 09 2021 09:28:04 GMT+0700 (Western Indonesia Time) merauke_8101

Laporan Dimensi 2

Dimensi Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD

Indikator yang terdapat pada Dimensi ini merupakan Mandatory Spending beberapa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari :

- * Alokasi Belanja Fungsi Pendidikan 20% dari APBD
- * Alokasi Belanja Fungsi Kesehatan 10% dari APBD diluar Gaji
- * Alokasi jumlah belanja infrastruktur yang langsung dalam alokasi dana transfer minimal 25% dari Dana Transfer Umum
- * Alokasi Belanja Untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)

1 Laporan Dimensi 2 **2** Cara Penentuan Skor **3** Dokumen Dimensi 2

1 Menu Laporan Dimensi 2

halaman ini berfungsi sebagai inputan dokumen laporan Alokasi Dana Pendidikan, Alokasi Dana Kesehatan, Alokasi Belanja Infrastruktur dan Indikator Alokasi Belanja Untuk Memenuhi SPM.

2 Menu Cara Penentuan Skor

halaman ini berisi tentang bagaimana cara penentuan skor untuk Dimensi 2

3 Menu Dokumen Dimensi 2

halaman ini berisi dokumen petunjuk teknis

Cara Mengupload Dokumen

Dimensi-2 Alokasi Belanja dalam APBD

Alokasi jumlah belanja untuk fungsi pendidikan min 20% dari APBD

Alokasi jumlah belanja untuk urusan kesehatan min 10% dari APBD

Alokasi jumlah belanja untuk infrastruktur min 25%

1. Alokasi jumlah belanja untuk memenuhi SPM sesuai perundang-undangan

1. Alokasi Dana Pendidikan

Belanja langsung bidang pendidikan			Belanja Tidak Langsung bidang Pendidikan					Total Belanja Daerah		
Belanja Langsung Dinas Pendidikan			Belanja Langsung diluar Dinas Pendidikan yang Menghasilkan Output Menunjang pendidikan		Belanja Tidak Langsung pada dinas Pendidikan (Belanja Pegawai)		Bantuan Keuangan Kepada Pemda Lainnya dan pemerintah desa yang menunjang bidang Pendidikan	Hibah untuk Pendidikan	Bantuan Sosial untuk Pendidikan	Total Belanja Daerah
Belanja Pegawai	Belanja barang dan jasa	Belanja Modal								

2. Alokasi Dana Kesehatan

Belanja langsung bidang kesehatan			Belanja Tidak Langsung Bidang Kesehatan					Total Belanja Daerah	Saldo ASN		
Belanja Langsung Dinas Kesehatan			Belanja Langsung diluar Dinas Kesehatan yang Menghasilkan Output Menunjang Kesehatan		Belanja Tidak langsung pada Dinas Kesehatan (Belanja Pegawai)		Bantuan keuangan kepada pemerintah daerah lainnya yang menunjang bidang kesehatan	Hibah untuk Kesehatan	Bantuan Sosial untuk Kesehatan	Total Belanja Daerah	Saldo ASN
Belanja Pegawai	Belanja barang dan jasa	Belanja Modal									

3. Alokasi Belanja Infrastruktur

Transfer Umum Yang diperhitungkan			Belanja Infrastruktur daerah									
Penyerahan Dana Transfer Umum		Pengurang	belanja langsung			belanja modal			Belanja Pemeliharaan			Belanja hibah
DAU	DBH	DAU tambahan	DBH yang bersifat ad-hoc	ADD	tanah	peralatan dan mesin	bangunan dan gedung	Jalan, irigasi dan jaringan	aset tetap lainnya	aset lainnya	Belanja Pemeliharaan	Belanja hibah

4. Indikator Alokasi Belanja Untuk Memenuhi SPM

URUSAN	JENIS PELAYANAN DASAR SPM	PAGU
PENDIDIKAN	1. pendidikan anak usia dini;	
	2. pendidikan dasar;	
	3. pendidikan kesetaraan;	

5. Simpan Data Tahun Ini

SUMBER DATA :
PERUBAHAN APBD

Dimensi-3 Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Keterangan : Diskominfo berkoordinasi dengan Bappeda dan BPKAD dalam mengunggah 29 dokumen ke dalam website pemda

1	Informasi Ringkasan Dokumen RKPD
2	Informasi Kebijakan Umum Anggaran
3	Informasi Ringkasan Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran
4	Informasi Ringkasan Dokumen RKA SKPD
5	Informasi Ringkasan Dokumen RKA PPKD
6	Informasi Ringkasan Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
7	Informasi Peraturan Daerah tentang APBD
8	Informasi Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
9	Informasi Ringkasan DPA SKPD
10	Informasi DPA PPKD
11	Informasi Realisasi Pendapatan Daerah
12	Informasi Realisasi Belanja Daerah
13	Informasi Realisasi Pembiayaan Daerah
14	Informasi Ringkasan Dokumen Rancangan Perubahan APBD
15	Informasi Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
16	Informasi Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
17	Informasi Ringkasan RKA Perubahan APBD
18	Informasi Rencana Umum Pengadaan
19	Informasi SK Kepala Daerah tentang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
20	Informasi Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi
21	Informasi Laporan Arus Kas
22	Informasi Laporan Realisasi Anggaran Seluruh SKPD
23	Informasi Laporan Realisasi Anggaran PPKD
24	Informasi Neraca
25	Informasi CaLK Pemerintah Daerah
26	Informasi Laporan Keuangan BUMD/Perusahaan Daerah
27	Informasi Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah
28	Informasi Penetapan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
29	Informasi Opini BPK RI

KETEPATAN WAKTU :
TGL UNGGAH - TGL
PENETAPAN ≤ 30 HARI

KETERAKSESAN :
LINK/URL WEB PEMDA
DAPAT DIAKSES TANPA
VERIFIKASI (PASSWORD,
USERNAME, DLL)

Dimensi-3 Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Buat Laporan Dimensi 3

Tahun Dokumen

Dokumen Tahun 2021

Menampilkan dokumen yang belum pernah dibuat pada tahun anggaran yang telah kamu pilih diatas. Dokumen yang sudah dibuat atau sudah diukur tidak ditampilkan. Jika kamu tidak menemukan dokumen yang kamu cari maka dokumen itu sudah pernah dibuat pada tahun tersebut.

Ada **26 dokumen** lagi yang belum kamu buat di tahun yang kamu pilih diatas. Semakin lengkap laporan kamu maka kamu bakalan dapet indeks total yang bagus, karena pengukuran akan membagi 29 dokumen yang sudah ditetapkan dengan dokumen yang telah kamu buat.

Pilih nama dokumen yang ingin dibuat **1** Klik untuk memilih dokumen yang akan diunggah

Ketepatan Waktu

Skor ketepatan waktu diukur dari **jarak antara tanggal penetapan dan tanggal unggah**. Jika jarak tersebut **tidak melebihi BAU** yang ditetapkan maka laporan kamu sesuai. Jadi, semakin sedikit perbedaan jarak antara tanggal penetapan dan tanggal unggah maka semakin baik.

Tanggal Penetapan

Pilih tanggal penetapan disini ... **2** Pilih tanggal penetapan dokumen (tanggal yang bertanda-tangan)

Tanggal Unggah

Pilih tanggal unggah disini ... **3** Pilih tanggal unggah dokumen pada website pemda

Keteraksesan

Skor keteraksesan **bukan kami yang mengukur**, tetapi instansi diatas anda. Intinya khusus skor keteraksesan ini **dihitung secara manual**, tidak oleh sistem. Pastikan link dan bukti yang kamu upload dapat diakses, jika link yang kamu kirim **sedang tidak bisa di akses** maka setidaknya kamu punya bukti seperti **screenshot atau lainnya** dan jika ada kesalahan pada pengukuran kamu dapat **berdiskusi dengan yang mengukur** yaa hihi ...

Link Bukti Unggah

4 Unggah Screenshot bukti berupa tampilan dokumen yang dibuka pada web, dengan menampilkan URL web **5** Tahap terakhir, klik tombol ini

Dimensi-4 Penyerapan Anggaran

SUMBER DATA :
LRA pada LKPD

Dimensi penyerapan anggaran sebagai suatu kewajiban yang fundamental dalam pengelolaan keuangan daerah. Penyerapan anggaran diukur dengan membandingkan antara anggaran dan realisasinya.

Penentuan skor masing-masing indikator adalah persentase antara anggaran belanja dengan realisasinya. Apabila persentase antara anggaran dan realisasinya mencapai sama atau diatas 80% ($\geq 80\%$) maka skor diberi angka 1. Sebaliknya persentase anggaran dan realisasinya mencapai kurang dari 80% ($< 80\%$), maka skor diberikan angka 0. Penyerapan anggaran dalam APBD adalah skor rata-rata dikali dengan bobot.

Data Penyerapan Anggaran diambil dari dokumen LKPD.

Penyerapan Anggaran mencakup indikator yang disesuaikan dengan struktur anggaran:

- Anggaran belanja operasional
- Anggaran belanja modal
- Anggaran belanja tidak terduga
- Anggaran belanja transfer

Untuk daerah yang masih menggunakan struktur anggaran belanja sesuai peraturan anggaran menggunakan indikator yang meliputi penyerapan:

- Anggaran belanja pegawai
- Anggaran belanja bunga
- Anggaran belanja ekuivalen
- Anggaran belanja hibah
- Anggaran belanja bantuan sosial
- Anggaran belanja bagi hasil dan bantuan keuangan
- Anggaran belanja tidak terduga
- Anggaran barang dan jasa
- Anggaran belanja modal

1 Menu Laporan Dimensi 4
halaman ini berfungsi sebagai inputan dokumen laporan Belanja Operasional, Belanja Modal, Belanja Tidak terduga dan Belanja Transfer

2 Menu Cara Penentuan Skor
halaman ini berisi tentang bagaimana cara penentuan skor untuk Dimensi 4

3 Menu Dokumen Dimensi 4
halaman ini berisi dokumen petunjuk teknis

Penyerapan Anggaran
Belanja Operasional $\geq 80\%$

Penyerapan Anggaran
Belanja Modal $\geq 80\%$

Penyerapan Anggaran
Belanja Tidak Terduga $\geq 80\%$

1. Penyerapan Anggaran
Belanja Transfer $\geq 80\%$

Cara Mengupload Dokumen

Dimensi-4 Penyerapan Anggaran

SUMBER DATA :
LRA pada LKPD

Dimensi 4 | Laporan Penyerapan Anggaran Kembali

Detail Laporan

Dimensi penyerapan anggaran sebagai suatu kewajiban yang fundamental dalam pengelolaan keuangan daerah. Penyerapan anggaran diukur dengan membandingkan antara anggaran dan realisasinya.

Tahun Anggaran
Laporan Tahun 2021

[Lihat Laporan Dimensi 4](#)

Belanja Operasional

Anggaran	Rp. 800000000
Realisasi	Rp. 100000000
Sisa Anggaran	Rp. 700.000.000

Operasional

[Simpan Data Tahun Ini](#)

Belanja Modal

Anggaran	Rp. 1
Realisasi	Rp. 1
Sisa Anggaran	Rp. 0

Modal

■ Realisasi ■ Anggaran

Ketik Anggaran dan Realisasi utk Belanja Operasional dan Belanja Modal, sesuai pada dok.LRA

Cara Mengupload Dokumen

Dimensi-4
Penyerapan
Anggaran

SUMBER DATA :
LRA pada LKPD

Belanja Tidak Terduga

Anggaran Rp. 560000000

Realisasi Rp. 100000000

Sisa Anggaran Rp. 460.000.000

Belanja Transfer

Anggaran Rp. 6000000

Realisasi Rp. 4900000

Sisa Anggaran Rp. 1.100.000

Simpan Data Tahun Ini

Ketik Anggaran dan Realisasi utk Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer, sesuai pada dok.LRA

Dimensi-5 Kondisi Keuangan Daerah

**SUMBER DATA :
LO, Neraca, dan LRA pada
LKPD**

**KETERANGAN:
Wajib diisi, perhatikan
digit angka, jangan
sampai salah ketik**

Formula Dimensi Kondisi Keuangan Daerah

No	Indikator	Definisi	Formula
1.	Kemandirian Keuangan	Kemandirian keuangan adalah suatu kondisi pemerintah daerah tidak rentan terhadap sumber pendanaan di luar kendalinya atau pengaruhnya, baik dari sumber-sumber dalam negeri maupun luar negeri.	$\frac{\text{Total PAD}}{\text{total pendapatan}}$

No	Indikator	Definisi	Formula
2.	Fleksibilitas Keuangan	Fleksibilitas keuangan adalah suatu kondisi pemerintah daerah dapat meningkatkan sumber daya keuangan untuk menghadapi peningkatan komitmen, baik melalui peningkatan pendapatan atau peningkatan kapasitas utang (debt capacity).	$\frac{(\text{total pendapatan} - \text{DAK})}{(\text{total kewajiban} + \text{belanja pegawai})}$

No	Indikator	Definisi	Formula
3.	Solvabilitas Operasional	Solvabilitas operasional merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan untuk menutupi beban operasional pemerintah selama periode anggaran.	$\frac{\text{Total pendapatan LO} - \text{pendapatan DAK LO}}{\text{total beban LO.}}$

Dimensi-5 Kondisi Keuangan Daerah

**SUMBER DATA :
LO, Neraca, dan
LRA pada LKPD**

Formula Dimensi Kondisi Keuangan Daerah

No	Indikator	Definisi	Formula
4.	Solvabilitas Jangka Pendek	Solvabilitas keuangan jangka pendek menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang jatuh tempo dalam waktu kurang atau sama dengan 12 bulan.	$\frac{(\text{Kas dan setara kas} + \text{Investasi Jk. Pendek})}{\text{Kewajiban Lancar}}$

No	Indikator	Definisi	Formula
5.	Solvabilitas Jangka Panjang	Solvabilitas jangka panjang merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjang.	$\frac{\text{Total aset tetap}}{\text{kewajiban jangka panjang}}$

No	Indikator	Definisi	Formula
6.	Solvabilitas Layanan	Solvabilitas layanan menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk menyediakan dan mempertahankan kualitas pelayanan publik yang dibutuhkan dan diinginkan oleh masyarakat.	$\frac{\text{Total aset tetap}}{\text{jumlah penduduk}}$

Dimensi-5 Kondisi Keuangan Daerah

Cara Mengupload Dokumen

Dimensi 5 | Laporan Kondisi Keuangan Daerah

Untuk memulai, klik tombol ini

1

Kembali

[✕ Buat Laporan Baru](#)

Detail Laporan

Kondisi Keuangan Daerah adalah Kemampuan Keuangan suatu Pemerintah Daerah untuk memenuhi kewajibannya, mengantisipasi kejadian tak terduga, dan untuk mengeksekusi hak keuangan secara efisien dan efektif.

Tahun Anggaran*

Pilih laporan yang ingin dilihat

Jenis Klaster*

Pilih jenis klaster ...

[Lihat Atau Cari Data Dimensi 5](#)

Laporan Kondisi Keuangan Daerah

Terdapat 6 indikator yang akan digunakan saat pengukuran yaitu Kemandirian Keuangan, Fleksibilitas Keuangan, Solvabilitas Operasional, Solvabilitas Jangka Pendek, Solvabilitas Jangka Panjang dan Solvabilitas Layanan. Semua indikator tersebut memiliki rumus tersendiri yang didapat dari laporan keuangan daerah.

Klaster

Pilih jenis klaster

2 Pilih klaster kemampuan fiskal daerah berdasarkan PMK tahun berkenaan

Tahun Anggaran

Pilih laporan yang ingin dibuat

3

Pilih tahun anggaran yang ingin diinput

Jumlah Penduduk

4

Ketik jumlah penduduk daerah Anda

⏪

Dimensi-5 Kondisi Keuangan Daerah

5

LRA

Total PAD	Rp.	<input type="text"/>
Total Pendapatan	Rp.	<input type="text"/>
Pendapatan DAK	Rp.	<input type="text"/>
Belanja Pegawai	Rp.	<input type="text"/>

LO

Total Pendapatan	Rp.	<input type="text"/>
DAK	Rp.	<input type="text"/>
Total Beban Operasional	Rp.	<input type="text"/>

6

Neraca

Total Kewajiban	Rp.	<input type="text"/>
Kas dan Setara Kas	Rp.	<input type="text"/>
Investasi Jangka Pendek	Rp.	<input type="text"/>
Kewajiban Lancar	Rp.	<input type="text"/>
Total Asset Tetap	Rp.	<input type="text"/>
Kewajiban Jangka Panjang	Rp.	<input type="text"/>

File lampiran ini opsional. Bisa berisi catatan, rekapan atau informasi lebih detail lainnya. Sebelum kamu membuatnya sendiri lebih baik bertanya dengan instansi yang mengukur mengenai file lampiran ini. Siapa tau mereka punya kebijakannya tersendiri.

8

Upload satu atau lebih file lampirannya disini !...

Laporan ini masih bisa kamu ubah atau kamu hapus selama belum dilakukannya pengukuran. Kalo udah diukur laporannya udah gak ada lagi disini pastinya ada di menu hasil pengukuran dan kamu udah gak bisa mengubah atau menghapusnya.

9

Buat Laporan Ini

Cara Mengupload Dokumen

Dimensi-6 Opini BPK atas LKPD

The screenshot shows the IPKD web application interface. The main header displays 'Laporan Dimensi 6' and 'Dimensi Opini BPK'. A sidebar on the left contains a navigation menu with items: Dashboard, Laporan (selected), Dimensi 1, Dimensi 2, Dimensi 3, Dimensi 4, Dimensi 5, Dimensi 6, Hasil Pengukuran, and Lain-Lain. The main content area shows a list of opinion items with their respective scores and weights. At the bottom of the main content area, there are three tabs: 'Laporan Dimensi 6' (highlighted with a '1'), 'Cara Penentuan Skor' (highlighted with a '2'), and 'Dokumen Dimensi 6' (highlighted with a '3').

- 1 Menu Laporan Dimensi 6**
halaman ini berfungsi sebagai inputan dokumen Opini BPK
- 2 Menu Cara Penentuan Skor**
halaman ini berisi tentang bagaimana cara penentuan skor untuk Dimensi 6
- 3 Menu Dokumen Dimensi 6**
halaman ini berisi dokumen petunjuk teknis

Dimensi-6 Opini BPK atas LKPD

Cara Mengupload Dokumen

Dimensi 6 | Laporan Opini Badan Pemeriksaan Keuangan

Kembali

1

+ Buat laporan opini BPK baru disini

Detail Laporan

Pemberian opini atas LKPD yang dilakukan oleh BPK RI sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. Menu ini hanya menampilkan laporan yang **belum diukur**. Jika laporan sudah pernah dibuat dan tidak ada di menu ini kemungkinan laporan tersebut sudah diukur. Untuk melihat laporan tersebut, silahkan menuju ke menu **Hasil Pengukuran**

Pilih laporan yang ingin dilihat

Lihat Atau Cari Data Dimensi 6

Opini Badan Pemeriksaan Keuangan

Tahun Anggaran

2

Pilih laporan yang ingin dibuat

File Opini BPK

Seret atau pilih file **Opini BPK** disini !...

3

Keterangan

4

Buat laporan opini BPK

5

1. Klik tombol

2. Pilih TA berkenaan

3. Browse file Bukti WTP

4. Ketik Keterangan

5. Klik untuk membuat laporan

**KET :
HANYA
LAPORAN
WTP YANG
DIUNGGAH**

Terima Kasih